

**POLITIK IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI: STUDI PERAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DI
PEMPROV DKI JAKARTA**

Astri Kusuma Pertiwi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta faktor-faktor politik yang memengaruhinya dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai instrumen pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi yang melibatkan BPKP, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta sebagai representasi OPD pelaksana SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP berperan strategis melalui pembinaan, asistensi, evaluasi maturitas, dan koordinasi dengan APIP dalam memperkuat implementasi SPIP. Implementasi SPIP juga dipengaruhi oleh dinamika politik-organisasional, khususnya kepentingan aktor, kewenangan, komitmen pimpinan, dan relasi antarlembaga. Perspektif Kesbangpol menunjukkan bahwa kepentingan politik dapat muncul dalam pelaksanaan tugas OPD, namun implementasi tetap mengacu pada regulasi dan kewenangan yang berlaku. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi SPIP bergantung pada interaksi antara peran pembina, kondisi kelembagaan, dan dinamika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci: BPKP, implementasi kebijakan, pencegahan korupsi, politik implementasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

***THE IMPLEMENTATION POLITICS OF THE GOVERNMENT INTERNAL
CONTROL SYSTEM (SPIP) IN CORRUPTION PREVENTION: A STUDY OF
THE ROLE OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY
AGENCY (BPKP) IN THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA***

Astri Kusuma Pertiwi

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the political factors influencing the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) as an instrument for corruption prevention in the Provincial Government of DKI Jakarta. This study employs a qualitative approach with a case study method through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation involving BPKP, the DKI Jakarta Provincial Inspectorate, the Jakarta Representative Office of the Supreme Audit Agency (BPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), and the DKI Jakarta Agency for National and Political Unity (Kesbangpol) as a representative of an OPD implementing SPIP. The findings show that BPKP plays a strategic role through guidance, assistance, maturity evaluation, and coordination with APIP in strengthening SPIP implementation. SPIP implementation is also influenced by political-organizational dynamics, particularly actor interests, authority, leadership commitment, and inter-institutional relations. The Kesbangpol perspective shows that political interests may emerge in the implementation of OPD functions, while implementation remains guided by applicable regulations and institutional authority. This study concludes that the effectiveness of SPIP implementation depends on the interaction between the role of the supervisory institution, institutional conditions, and political dynamics in government administration.

Keywords: *BPKP, policy implementation, corruption prevention, implementation politics, Government Internal Control System (SPIP)*